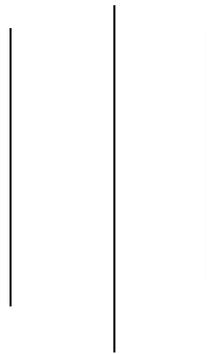




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU REHABILITASI
INFRASTRUKTUR PASCA GEMPA DI KABUPATEN
CIANJUR, JAWA BARAT
TANGGAL 18 – 20 MARET 2023**



**KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2023**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda Kunjungan	4
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA	5
II.1. Temuan dan Permasalahan	5
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	6
III. PENUTUP	7
IV. LAMPIRAN	8
Foto Kegiatan	8



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU REHABILITASI INFRASTRUKTUR PASCA GEMPA
DI KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT
TANGGAL 18 – 20 MARET 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI 14 Maret 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Untuk melakukan peninjauan rehabilitasi infrastruktur pasca gempa dan pemanfaatannya oleh masyarakat; dan
2. Untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dilaksanakan kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu :

- butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.*
- butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:” butir f *“mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti”*.

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 pada Tanggal 18 – 20 Maret 2023, yang dipimpin oleh Bapak Ridwan Bae (A-345/F-Golkar/Dapil Sulawesi Tenggara).

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Peninjauan Huntap Simagalih Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

II.1. Temuan dan Permasalahan dalam Kunjungan Spesifik ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tahap I sebanyak 200 rumah dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Cianjur dengan progres 100%, lalu Tahap II juga sedang dibangun 151 rumah dengan progress 90%, dan tahap III akan dibangun 149 rumah dari total kebutuhan 500 rumah, dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang dapat tahan gempa. Terkait dengan **pembangunan Huntap III belum dapat dilaksanakan karena belum ada kejelasan status lahan** dari pemerintah daerah Cianjur, oleh karena itu, perlu terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan Huntap Tahap III ini dapat terwujud
- 2) Pembangunan Huntap ini dilengkapi dengan spesifikasi bangunan diantaranya, struktur rumah tahan gempa RISHA, dinding bata ringan, dan plester aci, rangka atap bangunan menggunakan baja ringan dan penutup atap galvalum. Sedangkan lantainya menggunakan keramik ukuran 60x60 dengan pintu dan jendela berbahan UPVC, serta plafon gypsum. Selain itu, dalam kawasan Huntap tersebut juga dilengkapi jaringan listrik 900 watt, jaringan pipa air bersih PDAM, jalan lingkungan yang dicor beton, drainase, balai warga, rumah ibadah, dan *landscape*.
- 3) Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu secepatnya membuat **kejelasan status kepemilikan Huntap** yang telah dibangun agar tidak menjadi polemik dikemudian hari bagi masyarakat yang menggunakannya.
- 4) Ditjen Bina Marga telah dilakukan penanganan infrastruktur Jalan pasca gempa di kabupaten Cianjur, baik terhadap ruas Jalan Nasional maupun beberapa ruas Jalan daerah. Selanjutnya perlu dilakukan **penguatan struktur terhadap ruas Jalan yang berada di daerah rawan longsor** dan dilakukan preservasi dengan kualitas yang baik.
- 5) Ditjen Cipta Karya untuk secepatnya melakukan **relokasi terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di sekitar Huntap Tahap I**, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga diminta agar perlu **pendataan yang valid terhadap fasilitas publik** (baik fasilitas Pendidikan maupun Kesehatan) yang rusak akibat gempa sehingga semuanya dapat dibangun kembali.
- 6) Ditjen Perumahan perlu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait kualitas bangunan rumah dan gedung agar tahan gempa supaya terhindar dari dampak alam lainnya.

II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Cianjur atas kerjasamanya dalam menanggulangi bencana gempa bumi, baik pada saat tanggap darurat maupun sampai pada saat rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi pada November 2023. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan rencana pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak akibat gempa tersebut.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan masyarakat penerima Hunian Tetap (HunTap) untuk mempercepat penyerahan sertifikat rumah yang akan ditempati, sehingga terdapat kejelasan status kepemilikan atas hunian tersebut. Selain itu, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah agar mempercepat penyelesaian status lahan untuk pembangunan HunTap Tahap III untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi masyarakat korban bencana.
3. Komisi V DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran darurat gempa, agar selain menghasilkan konstruksi yang kuat dan nyaman bagi masyarakat pengguna, tetapi juga secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, Komisi V DPR RI meminta agar diperlukan dukungan dari dana APBN untuk mendukung pemulihan gempa Cianjur agar semua fasilitas publik yang rusak dapat segera dibangun dan berfungsi kembali demi pelayanan terhadap masyarakat.
4. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk memberikan edukasi dan pelatihan terkait kualitas konstruksi bangunan rumah tinggal, serta sosialisasi terkait sesar Cugenang di wilayah Cianjur agar wilayah tersebut tidak lagi dibangun rumah atau fasilitas publik lainnya, termasuk meningkatkan upaya pelestarian alam.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - 2023 pada tanggal 18 – 20 Maret 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan di tindaklanjuti dalam rapat bersama Kementerian terkait yang menjadi Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

KETUA TIM

ttd

RIDWAN BAE

A-345

IV. LAMPIRAN

Foto Kegiatan



